

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dari bab satu hingga empat, hasil pengolahan data NVivo, serta analisis dan interpretasi data, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diturunkan menjadi pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Arsitektur Keamanan Maritim untuk Mengurangi Potensi Konflik di Laut Cina Selatan

Dalam tesis ini, arsitektur dibentuk oleh tiga variabel kunci yaitu *knowing the sea*, *governing the sea*, dan *policing the sea*. Pengetahuan situasional (*knowing the sea*) berguna untuk menganalisis arsitektur ideal yang ingin dicapai dan pengembangan MDA regional. Laut Cina Selatan memiliki banyak potensi yang strategis bagi semua negara yang memilikinya. Berdasarkan gambaran *game theory*, status quo dianggap sebagai jalan terbaik. Bagi ASEAN, IFC bisa menjadi salah satu pusat informasi maritim yang kompeten. Data yang sudah didapat akan digunakan dalam proses *information sharing* dan kegiatan partoli terkoordinasi.

Pada variabel *governing the sea*, ASEAN mengakui urgensi dari multilateralisme untuk menyelesaikan konflik, selalu mengupayakan dialog politik yang aktif dan situasional, dan menanamkan komitmen yang tinggi terhadap stabilitas dan perdamaian regional, serta pembahasan isu penting melalui forum dan berbagai *platform* keamanan maritim. Meskipun begitu, perbedaan *national interest* dan tingkat kepentingan yang berbeda dalam mencapai arsitektur keamanan yang ideal kadang kala membuat ASEAN terpecah.

Pada variabel *policing the sea*, upaya yang sudah dilakukan oleh ASEAN untuk menjembatani proses penyelesaian konflik di LCS dilakukan melalui penyusunan draft DOC dan COC. Proses negosiasi yang lama secara faktual bisa diwajarkan karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan gerbang dialog untuk mencari jalan tengah masih terhambat oleh situasi pandemi covid-19. Resolusi konflik lain yang bisa diusahakan oleh ASEAN diantaranya adalah *confidence and trust building*, diplomasi, *conflict management*, dll. Upaya penegakan hukum biasanya terhambat karena RCC selalu mengedepankan *China's Lawfare* dan melakukan tindakan yang agresif untuk menutupi *unlawful acts* yang sudah mereka lakukan di LCS.

b. Peran Indonesia sebagai *Regional Leader* untuk Mendukung Pembentukan Arsitektur Keamanan Maritim di LCS

Dalam isu LCS, eksistensi Indonesia sebagai *natural leader* sudah mendapat pengakuan dari masyarakat ASEAN. Faktanya kita sudah membuktikan hal itu melalui berbagai terobosan ide, upaya, dan *platform* yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik di LCS. Secara umum, tata kelola maritim kita berada pada level moderat dan masih bisa ditingkatkan ke level signifikan jika pemerintah memiliki *political will* dan *political practice* yang baik terhadap hal ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran teoretis dan saran praktis yang diajukan sesuai dengan masalah yang muncul pada latar belakang penelitian dengan harapan isu yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pemangku kebijakan, dan secara akademis dapat dilanjutkan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

a. Rekomendasi Teoritis

Penelitian ini telah membuktikan bahwa teori dan konsep mengenai keamanan maritim, aritektur keamanan maritim, *maritime domain awareness*, *regional leadership*, dan stabilitas kawasan bisa digunakan untuk menganalisa penelitian terkait arsitektur keamanan maritim di kawasan manapun, termasuk perairan Laut Cina Selatan yang sedang diintai oleh eskalasi konflik dan ketegangan. Peneliti menggunakan perangkat NVivo dan analisis Miles, Huberman, & Saldana (2014) untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data dan analisis data penelitian secara objektif dan visualitatif. Kedua metode ini bisa digunakan pada penelitian kualitatif lainnya.

Gap yang sudah didapatkan oleh peneliti dari hasil perbandingan kondisi faktual dan ideal di lapangan bisa dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya mengenai proses pemetaan konflik maritim di kawasan LCS, efektivitas forum-forum keamanan maritim di ASEAN dalam proses penyelesaian konflik, pengaruh konflik LCS terhadap peta geopolitik kawasan Asia Pasifik di masa depan, pertimbangan ASEAN sebagai pakta pertahanan di kawasan Asia Pasifik, evaluasi dan akselerasi BAKAMLA sebagai *coast guard* percontohan di kawasan ASEAN.

b. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil pengumpulan data, proses analisis dan interpretasi, serta penarikan kesimpulan; maka beberapa saran yang bisa peneliti ajukan kepada para *stakeholders* dalam penyelesaian konflik ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Negara-negara di ASEAN seharusnya memiliki pemahaman yang sama mengenai efek destruktif konflik, dan membangun MDA regional melalui proses peningkatan kuantitas dan kualitas pusat maritim. MDA juga harus didukung oleh

kerjasama dan *information sharing* yang lebih intensif diantara para anggota. Tidak boleh ada pusat maritim yang saling menjatuhkan atau melakukan tindakan provokatif lainnya.

2. Dalam mekanismenya, ASEAN bisa menggunakan *high council* untuk membantu proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. COC harus diselesaikan secepatnya, memiliki daya ikat yang lebih kuat namun tetap berpegang teguh kepada UNCLOS 1982.
3. ASEAN perlu menyatakan sikap kolektifnya mengenai keberadaan QUAD, AUKUS, atau organisasi sejenis yang bisa mengganggu stabilitas keamanan maritim di kawasan. Meskipun terlihat sulit untuk dicapai, namun ASEAN sudah sepatutnya bisa menyadarkan beberapa pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang konfrontatif di wilayah ini.
4. Upaya untuk 'kembali ke laut' harus diimplementasikan oleh pemerintah selama beberapa dekade ke depan. Tidak peduli presiden dan partai politik mana yang sedang berkuasa, visi Poros Maritim Dunia sudah seharusnya bisa diestafetkan. Dengan potensi maritim yang luar biasa, Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh sebagai negara adidaya yang netral dengan kekuatan maritim yang besar.
5. Penilaian *good maritime governance* yang kuantitatif dan mutakhir, sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses pengambilan kebijakan di domain maritim.